Bali Post

Beratkan APBD

Bantuan Sepeda Motor Dihibahkan

Singaraja (Bali Post) –

Masih ingat dengan bantuan sepeda motor dinas untuk masing-masing Klian Desa Pakraman se-Buleleng? Setelah bantuan itu diterima, ternyata biaya pemeliharaan bantuan tersebut cukup memberatkan anggaran APBD Buleleng. Atas kondisi ini, dewan di Buleleng mengusulkan agar bantuan tersebut dihibahkan.

Informasi yang dihimpun di lapangan Kamis (27/8), menyebutkan, tiga fraksi yakni Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra kompak mempertanyakan kalau biaya perawatan dan pemeliharaan sepeda motor itu terkesan tidak jelas. Wakil rakyat ini mengetahui kalau bantuan sepeda motor dari pemerintah daerah itu dipinjampakaikan kepada para Klian Desa Pakraman. Pihaknya berpendapat dengan status pinjam pakai, bantuan sepeda motor itu masih menjadi aset daerah. Sebagai aset daerah pembiayaan terhadap sepeda motor itu menjadi tanggung jawab pemkab. Situasi ini pun dengan sendirinya membebankan APBD.

Atas situasi ini, anggota Fraksi Demokrat, Dewa Putu Tjakra, mengusulkan agar bantuan ini dihibahkan. Dengan demikian, bantuan sepeda motor tersebut, pembiayaan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemkab. Karena selama tidak lagi menjadi aset pemkab, maka pembiayaan menjadi tanggung jawab desa pakraman. Dengan demikian, pemerintah bisa mengurangi beban anggaran operasional sepeda motor dinas tersebut. "Kalau dihibahkan berarti beban anggaran operasional itu bisa kita hilangkan, karena desa adat atau desa pakraman yang bertanggung jawab untuk menanggung beban operasionalnya," katanya.

Usulan dewan tersebut langsung direspons oleh Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana (PAS). Bupati langsung memutuskan menghibahkan pemberian bantuan sepeda motor dinas tersebut. Bupati PAS saat ditemui di gedung DPRD Buleleng mengatakan, status pinjam pakai atas sepeda motor Honda Vario CW tahun 2013, kepada desa pakraman tidak akan diperpanjang lagi. Selanjutnya, pemkab akan menghibahkan sepeda motor tersebut kepada masing-masing desa pakraman. "Kami sepakat dan segera akan menghibahkan bantuan motor dinas itu kepada seluruh desa pakraman di Buleleng," katanya.

Untuk diketahui, bantuan sepeda motor jenis Honda Vario itu diserahkan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, kepada masing-masing Klian Desa Pakraman tahun 2013 lalu. Jumlahnya 165 unit sesuai jumlah desa pakraman yang ada. Penyerahan dilakukan dalam dua tahap, pertama sebanyak 117 unit kemudian sisanya di pengujung tahun 2013.

Pemberian bantuan hibah sepeda motor tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab Buleleng memperkuat keberadaan desa pakraman. Sejauh ini, pemerintah menyadari tingkat mobilitas dari para klian, sehingga perlu didukung dengan pengadaan sepeda motor. **(kmb38)**

Edisi : Sabtu, 29 Agustus 2015

Hal : 7

Bali Post

Dana Kampanye Paslon Maksimal Rp 13,5 Miliar

Tabanan (Bali Post) -

Dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan untuk masing-masing pasangan calon (paslon) dibatasi hingga Rp 13,5 miliar. Jumlah maksimal ini didapatkan dari rapat koordinasi (rakor) bersama tim pemenangan tentang perhitungan estimasi pembatasan dana kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tabanan belum lama ini.

"Pembatasan dana kampanye sudah disepakati oleh kedua tim pemenangan. Kami pun sudah menerima laporan awal dana kampanye," ujar Ketua KPUD Tabanan Ni Luh Darayoni, Jumat (28/8) kemarin. Besaran dana itu untuk membiayai semua kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kampanye yang berlangsung selama 98 hari, terhitung mulai 27 Agustus hingga 5 Desember 2015 mendatang.

Rincian penggunaan dana untuk kegiatan kampanye baik terbuka maupun tertutup, semua harus menyertakan bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah, sebab akan diaudit. Aturan yang diberlakukan KPU ini dimaksudkan agar masing-masing paslon tidak terlalu berlebihan dalam penggunaan dana. "Saat ini SK pembatasan dana kampanye tengah kami buat," ucapnya.

Menurut Darayoni, jumlah batas dana kampanye tersebut telah diatur dalam peraturan KPU Pusat. "Jadi, sudah ada rumusnya untuk menentukan estimasi berapa jumlah batasan dana kampanye. Seperti berapa kali akan melaksanakan kegiatan dan massa yang diundang," paparnya.

Sementara terkait alat peraga kampanye, mantan pengacara itu menegaskan, alat peraga berupa baliho seluruhnya dipasang oleh KPU dan lokasi pemasangannya berkoordinasi dengan Pemkab Tabanan. Pasangan calon dan tim pemenangan tidak diperkenankan membuat dan memasang alat peraga kampanye selain yang telah dibuat oleh KPU. Untuk suvenir seperti kaos dan mug boleh dibuat oleh paslon dengan syarat harganya tidak lebih dari Rp 25 ribu.

Bali Post/kmb28

Ni Luh Darayoni

Terkait alat peraga kampanye, KPU menyiapkan lima baliho untuk masing- masing paslon yang akan dipasang di zona yang telah ditentukan, dua spanduk di desa-desa, dan 20 umbul-umbul ditempatkan di kecamatan. "Sesuai ketentuan, selain yang difasilitasi oleh KPU, paslon atau tim pemenangan dilarang mencetak atau memasang alat peraga dengan alasan apa pun," tegas Darayoni. **(kmb28)**

Edisi : Sabtu, 29 Agustus 2015

Hal : 14

Bali Post

Bali Post/olo

FONDASI - ***Sejumlah pekerja nampak mulai menggarap fondasi di tanah urukan di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk. Diduga pembangunan ini belum mengantongi IMB.***

Fondasi Bangunan di Banyubiru Diduga Belum Kantongi IMB

Negara (Bali Post) -

Sebidang tanah di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk, Desa Banyubiru yang diuruk serta dibangun fondasi diduga belum berizin. Rencananya di tanah itu akan dibangun rumah makan. Tetapi kendati telah mulai pembangunan untuk fondasi, tidak nampak papan informasi izin bangunan (IMB). Menurut informasi yang dihimpun Jumat (28/8) kemarin, pengurukan tanah itu sudah mengantongi izin untuk alih fungsi lahan. Seperti yang terlihat nampak sejumlah pekerja sudah mulai bekerja menggarap fondasi.

Aktivitas para pekerja itu terlihat jelas dari pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk. Tanah itu rencananya dibangun rumah makan. Rumah makan ini sebelumnya juga sudah berdiri di tempat lain di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk. Tetapi sejumlah pekerja di lokasi mengaku belum mengetahui pasti. Mereka hanya diminta untuk membuat fondasi.

Sementara itu, Camat Negara I Ketut Karyadi Erawan ditemui mengatakan mengetahui adanya pengurukan tersebut. Dari informasi, rencananya di sana akan dibangun rumah makan. Tetapi menurutnya dari pengecekan sudah memiliki rekomendasi untuk alih fungsi saja. Sedangkan untuk IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pihaknya belum mengetahuinya dan melihat secara langsung.

Menurut Camat, semestinya untuk aktivitas membangun bangunan, sebelum membangun harus mengatongi IMB. "Semestinya kan seperti itu (IMB)," ujarnya. Untuk di lahan tersebut, pihaknya belum mengetahui kalau sudah ada aktivitas pembangunan. "Nanti kami akan cek lewat Satpol PP Kecamatan," terang Karyadi. **(kmb26)**

Edisi : Sabtu, 29 Agustus 2015

Hal : 12